

Gambaran Ruang Lingkup

LAPORAN EITI 2014

Maryati Abdullah

Koordinator Nasional | Publish What You Pay Indonesia

**Dipresentasikan dalam FGD EITI Indonesia – Kemenko Perekonomian RI
Banjarmasin, 15 September 2015**

PENDAHULUAN

- **Sebelum melakukan proses pelaporan, rekonsiliasi dan publikasi, Laporan EITI harus didahului oleh sebuah Scoping Study sebagai kerangka pelingkupan laporan, jenis informasi, batas materialitas dan acuan mendasar bagi sebuah Laporan EITI**
- **Ruang lingkup laporan EITI Tahun 2014 harus memenuhi standard baru EITI (EITI Standard, 2013)**
- **Kerangka Acuan (*Term Of Reference*) Scoping Study harus sesuai dengan keputusan MSG EITI Indonesia – yang mengacu pada panduan standar internasional**
- **Laporan Scoping Study harus melibatkan MSG, serta harus sesuai dengan persetujuan MSG**

Tujuan Scoping Study

- Tujuan Utama Scoping Study adalah untuk memberikan acuan bagi penyusunan Laporan EITI 2014, yang meliputi ruang lingkup informasi (dan batas materialitas) yang akan dipublish dalam Laporan-baik jenis informasi yang akan direkonsiliasi maupun yang tidak direkonsiliasi dan informasi kontekstual, termasuk rekomendasi bagi tindak lanjut temuan laporan dan perbaikan kebijakan.

Relevansi dan Cakupan - Umum

1. Memperkuat keterbukaan informasi untuk memastikan aksesibilitas, reliabilitas dan melengkapi mekanisme keterbukaan sistem pemerintahan dan private sektor yang sekarang sedang berjalan
2. Penyertaan Data & Laporan EITI pada Portal/Laporan Pemerintah saat ini (misal, melengkapi LKPP)
3. Menyediakan informasi kontekstual terkait tujuan dan rencana kerja MSG, dan persyaratan EITI Standard
4. Aliran Pembayaran dan Penerimaan yang dilaporkan, termasuk batas materialitas yang wajar dan dapat diterapkan
5. Tambahan aliran manfaat dari industri ekstraktif yang dilaporkan
6. Daftar perusahaan, BUMN dan Entitas Pemerintah yang akan melaporkan EITI
7. Realibilitas dan ketersediaan data, termasuk tinjauan praktek audit saat ini dan jaminan yang harus disediakan oleh
8. Membahas beberapa kemungkinan keterbatasan untuk membuka data pada level tertentu

Informasi kontekstual

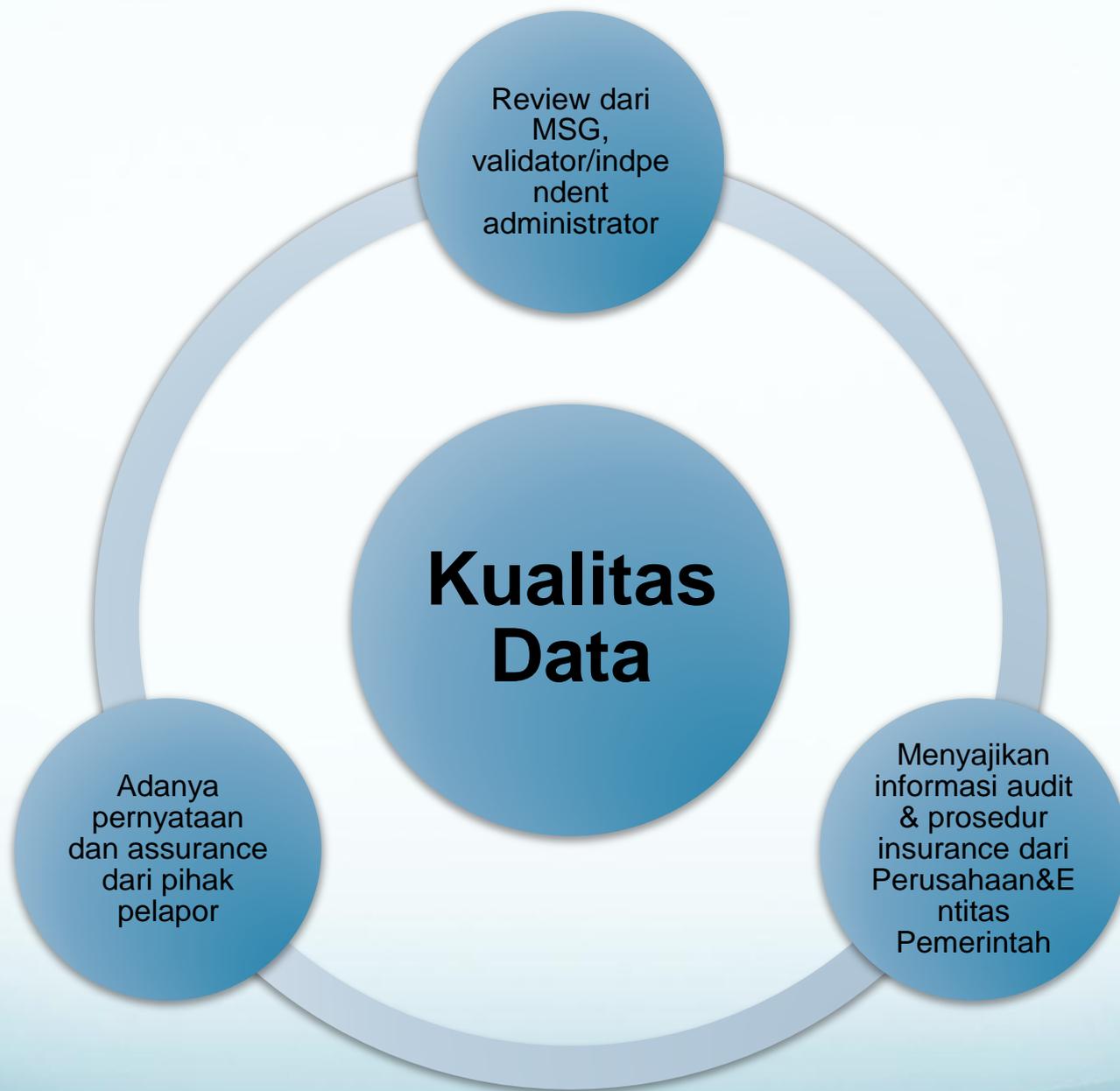
- Kerangka Legal/Regulasi
- Paparan Situasi Industri Ekstraktif, termasuk beberapa aktifitas eksplorasi signifikan
- Kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian
- Data produksi dan ekspor
- Peran BUMN, penyertaan modal pemerintah, belanja quasi fiskal, dan komposisi kepemilikan
- Alokasi pendapatan dan distribusinya
- Ketersediaan dan komprehensifitas informasi registrasi publik dari alokasi ijin
- Ketersediaan data perusahaan yang terdaftar secara publik dari beneficial owner perusahaan industri ekstraktif
- Kebijakan keterbukaan kontrak dan perijinan yang mengatur proses eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif

Rekonsiliasi Laporan

- Analisis aliran penerimaan sektor industri ekstraktif (Migas, Minerba) – baik Level Nasional maupun Sub-Nasional
- Analisis sistem penerimaan dan akuntansi keuangan (Pajak maupun Non-Pajak)
- Analisis aliran penerimaan in-kind, penyediaan infrastruktur serta skema barter – jika ada
- Pelaksana scoping study diminta untuk menjelaskan ketersediaan, sumber data dan rekomendasi agar data-data tersebut dapat diakses oleh publik

Materialitas Aliran Penerimaan dlm Rekonsiliasi

- Tinjauan informasi kadaster dan penerimaan negara
- Menyajikan informasi awal jumlah perusahaan yang harus melaporkan-sesuai batas materialitas yang diusulkan
- Identifikasi data perusahaan yang memungkinkan, misal : NPWP, fase eksplorasi/eksploitasi, dan jenis ijin
- Identifikasi badan/instansi Pemerintah yang harus melaporkan, termasuk pemerintah daerah



Review dari
MSG,
validator/independent
administrator

Kualitas Data

Menyajikan
informasi audit
& prosedur
insurance dari
Perusahaan & Entitas
Pemerintah

Adanya
pernyataan
dan assurance
dari pihak
pelapor

Tambahan – Syarat Pelaksana Scoping Study

- Pelaksana (Consultant) Scoping Study sesuai dengan guidance dari EITI Internasional, harus memiliki kriteria : (1) memahami aspek teknis dan aspek financial sektor industri ekstraktif, termasuk memiliki pemahaman dan pengalaman bekerja untuk aspek transparansi dan perbaikan tata kelola, akuntabilitas keuangan publik, serta dialog multi-pihak. Lebih diutamakan yang memiliki pengalaman terkait EIT; (2) Memiliki pengetahuan terkait migas, tambang dan sumber daya alam lainnya, terutama yang memahami konteks Indonesia; (3) dapat menunjukkan tract record pada area kerja yang serupa



Terima Kasih

www.pwyp-indonesia.org

maryati@pwyp-indonesia.org